



Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Setia Waruwu Universitas Nias Setiawaruwu300@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Sukaaro Waruwu Universitas Nias sukawaruwu414@gmail.com	
Yamolala Zega Universitas Nias zymolala@gmail.com	
Odaligoziduhu Halawa Universitas Nias oda15halawa@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Waruwu, S., Waruwu, S., Zega, Y., & Halawa, O., (2025). Analisis Efektivitas Sistem Pengawasan Internal dalam Meningkatkan Kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2758-2767

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengawasan internal di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nias dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan, ketertiban administrasi, dan ketepatan waktu pelaporan, terutama pada tahap kampanye. Namun, efektivitasnya belum merata di seluruh kecamatan karena dipengaruhi oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan pemanfaatan teknologi, birokrasi pelaporan yang rumit, dan distribusi pelatihan yang tidak merata. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain standarisasi pengawasan di seluruh wilayah, penyederhanaan administrasi, percepatan evaluasi, penerapan sistem digital terintegrasi, dan peningkatan kapasitas SDM secara berkala. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penguatan pengawasan internal Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Kata Kunci: Pengawasan internal, Bawaslu, Pilkada Serentak 2024, efektivitas kinerja, pengawasan pemilu.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the internal supervision system implemented by the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Nias Regency during the 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada). A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis. The findings indicate that the internal supervision system has positively contributed to improving discipline, administrative order, and timeliness of reporting, particularly during the campaign stage. However, its effectiveness has not been evenly distributed across all districts due to disparities in human resource quality, limited use of technology, complex reporting bureaucracy, and unequal training distribution. This study recommends several strategic measures, including standardizing supervision across all areas, simplifying administrative procedures, accelerating evaluation processes, implementing an integrated digital reporting system, and enhancing human resource capacity through regular training. These findings are expected to serve as a reference for strengthening Bawaslu's internal supervision to support professional, transparent, and accountable election administration.

Key Words: Internal supervision, Bawaslu, 2024 Simultaneous Regional Elections, performance effectiveness, election monitoring.

A. Pendahuluan

Pengawasan dan evaluasi kerja merupakan salah satu fungsi manajemen yang esensial dalam memastikan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Dalam organisasi swasta, pengawasan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat operasi bisnis. Melalui mekanisme pengawasan, perusahaan dapat memonitor kinerja karyawan, mengevaluasi implementasi strategi bisnis, dan mendeteksi potensi penyimpangan yang dapat memengaruhi keberlanjutan organisasi maupun usaha yang dijalankan.

Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam mengelola kinerja organisasi di berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintahan. Di tingkat nasional, pengawasan internal dijalankan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan administrasi dan operasional. Sistem pengawasan internal menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan organisasi. Menurut Choirulsyah & Azhar (2024), pengawasan internal merupakan rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan sangat ditentukan oleh efektivitas sistem pengawasan, terutama pengawasan internal di dalam lembaga yang memiliki otoritas dalam mengawal proses tersebut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas Melakukan Pengawasan

terhadap seluruh tahapan pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan agar pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi.

Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, ditemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran prosedural, penyimpangan administrasi, hingga turunnya kualitas kinerja aparat pengawas pemilu (Fachrezi & Nasution, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan internal merupakan elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas lembaga pengawas.

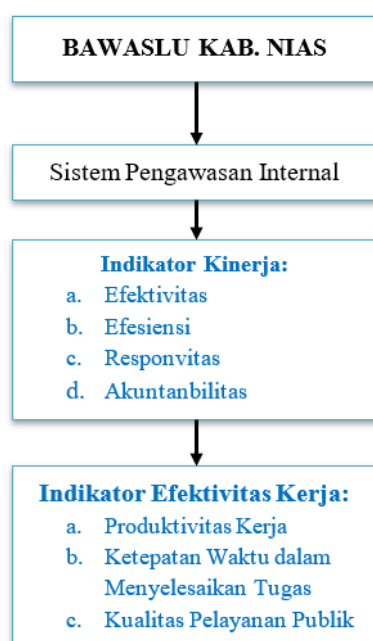
Dalam konteks lokal, Kabupaten Nias turut serta dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Nias sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di wilayah tersebut memikul tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya beberapa persoalan yang

menunjukkan belum optimalnya sistem pengawasan internal di lembaga ini. Di antaranya adalah minimnya monitoring secara berkala, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan, serta belum konsistennya evaluasi kinerja terhadap pegawai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat integritas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas kinerja lembaga secara keseluruhan.

Kinerja pegawai yang tidak maksimal tentu berdampak serius, seperti keterlambatan dalam mendeteksi pelanggaran, meningkatnya potensi manipulasi data, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas. Situasi ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan internal yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan internal, serta merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat kinerja pegawai dan lembaga secara keseluruhan.

Teori Pengawasan oleh Handoko dikutip dalam Pandibu (2022) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup empat aspek: penetapan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan nyata, perbandingan dengan standar, dan tindakan koreksi. Ini penting untuk menjamin efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), pengawasan internal mencakup lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lebih lanjut, Setiawan (2024) dalam bukunya yang berjudul "Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori Dan Praktek," menyatakan bahwa pengawasan internal yang efektif merupakan fondasi dalam memastikan kinerja pegawai yang tinggi, terutama di organisasi yang bergerak di bidang pelayanan publik.

Beberapa penelitian terdahulu juga memberikan gambaran yang mendukung urgensi dari penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Waluyo & Rodiyah (2023) yang berjudul: "Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020," menemukan bahwa sistem pengawasan internal yang terstruktur mampu meningkatkan kinerja pegawai hingga 35% melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi secara langsung dan berkesinambungan. Selanjutnya penelitian oleh Marwah dkk (2024) yang berjudul "Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Kinerja Pada Bawaslu Kota Makassar." Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya perhatian terhadap pemantauan berkala dan pelatihan pegawai menyebabkan penurunan efektivitas kinerja pegawai dan staf pendukung.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran pengawasan internal yang menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan suatu organisasi, khususnya di lembaga pemerintahan seperti Bawaslu. Permasalahan yang

ditemukan di Bawaslu Kabupaten Nias, mulai dari lemahnya monitoring berkala hingga kurang optimalnya kinerja pegawai, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas sistem pengawasan internal yang diterapkan. Selain itu, kesenjangan penelitian sebelumnya yang belum banyak mengeksplorasi konteks pengawasan pemilu di wilayah lokal dengan tantangan spesifik seperti geografis, anggaran, dan sumber daya manusia, semakin memperkuat urgensi penelitian ini.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya mengenai efektivitas sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami persepsi, pengalaman, dan interpretasi subjek penelitian terkait penerapan pengawasan internal, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi hubungan kerja dan kinerja pegawai. Metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sehingga hasil penelitian yang diperoleh bersifat kontekstual dan mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Sejalan dengan pandangan Yuliani dan Supriatna (2023), pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi tanpa berusaha melakukan generalisasi, melainkan menekankan pada penggalan makna subjektif dari pengalaman informan. Penelitian kualitatif juga dipandang tepat sebagaimana dikemukakan oleh Karya dkk (2024) karena mampu menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode kuantitatif, khususnya pada topik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, perilaku organisasi, dan dinamika internal lembaga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara rinci bagaimana sistem pengawasan internal diterapkan, bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi kinerja pegawai, serta kendala dan peluang yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Sesuai dengan pandangan Pugu dkk (2024), penelitian kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap isu yang belum banyak diteliti, menggunakan teknik pengumpulan data non-numerik seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses pengawasan, interaksi antarpegawai, dan dampaknya terhadap indikator kinerja seperti produktivitas, ketepatan waktu, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan relevansi, pengalaman, dan posisi strategis mereka di Bawaslu Kabupaten Nias. Pemilihan informan mempertimbangkan kriteria seperti keterkaitan langsung dengan topik penelitian, peran dalam proses pengawasan internal, pengalaman dalam manajemen sumber daya manusia, serta kesiapan untuk berpartisipasi secara aktif dalam wawancara. Hal ini sejalan dengan pandangan Wada dkk (2024) bahwa informan merupakan sumber utama data dalam penelitian kualitatif karena memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan yang relevan. Selain itu, Creswell dalam Weyant (2024) menegaskan pentingnya pemilihan informan yang sesuai agar data yang diperoleh valid dan kaya secara substansi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melibatkan informan yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka, memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat dan mendalam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan daftar pertanyaan semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan bagi informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangannya, observasi langsung terhadap pelaksanaan pengawasan internal di Bawaslu, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan prosedur pengawasan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola-pola, tema, dan kategori yang muncul dari data, untuk kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang utuh. Proses analisis ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, rinci, dan komprehensif mengenai efektivitas sistem pengawasan internal, sekaligus mengungkap faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhi kinerja pegawai. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi peningkatan kualitas pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias, serta menjadi referensi untuk penguatan kinerja lembaga dalam pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Bawaslu Kabupaten Nias telah mengimplementasikan sistem pengawasan internal yang dirancang secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen perencanaan pengawasan tahapan Pemilu. Sistem ini meliputi monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian kinerja pegawai yang bersifat preventif dan korektif. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui penerimaan laporan, tetapi juga supervisi langsung di lapangan oleh pimpinan dan koordinator. Tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan seluruh tahapan Pilkada tidak luput dari pengawasan, mencegah potensi pelanggaran sejak dini, dan menjaga netralitas serta profesionalisme pengawas. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Nias menerapkan pengawasan berbasis supervisi berjenjang di mana setiap koordinator divisi dan Panwascam wajib menyampaikan laporan periodik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem ini telah memberi dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai, khususnya dalam aspek kedisiplinan, ketertiban administrasi, dan ketepatan waktu pelaporan. Pegawai menjadi lebih berhati-hati dan disiplin karena merasa setiap langkah kerjanya diawasi. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring belum konsisten di seluruh kecamatan. Beberapa wilayah mendapatkan pengawasan lebih ketat dibanding wilayah lainnya, terutama pada tahap kampanye dan pemungutan suara, sedangkan tahap rekapitulasi suara cenderung kurang optimal. Selain itu, birokrasi pelaporan yang panjang, mulai dari pencatatan manual hingga verifikasi berjenjang, justru sering memperlambat penyelesaian masalah di lapangan. Kondisi ini menimbulkan paradoks, di mana sistem yang dirancang untuk mempercepat koordinasi terkadang menjadi penghambat akibat prosedur yang kurang fleksibel.

Beban administratif juga menjadi tantangan signifikan. Sebagian pegawai mengaku terbantu dengan adanya arahan yang jelas, namun di sisi lain merasa terbebani dengan kewajiban membuat laporan mingguan dan bulanan yang sangat detail. Tingginya intensitas pelaporan membuat sebagian pengawas lebih fokus pada penyusunan dokumen dibandingkan aktivitas pengawasan langsung di lapangan. Tekanan psikologis pun muncul, terutama pada masa tahapan padat, seperti kampanye dan rekapitulasi suara, di mana beban kerja dan beban mental meningkat secara bersamaan. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara pengendalian kinerja yang ketat dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, agar profesionalisme tetap terjaga tanpa mengurangi motivasi pegawai.

Dalam hal indikator efektivitas, Bawaslu Kabupaten Nias menggunakan ukuran seperti ketepatan waktu laporan, kualitas hasil pengawasan, jumlah temuan pelanggaran yang ditindaklanjuti, absensi pengawas, disiplin administrasi, dan integritas. Meskipun indikator ini bermanfaat secara administratif, sebagian pengawas menilai bahwa indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan, terutama di wilayah dengan akses sulit. Dari perspektif evaluasi, sistem pengawasan internal telah dilengkapi jadwal rutin laporan mingguan dan evaluasi bulanan, namun praktiknya tidak selalu tepat waktu. Ketika tahapan Pilkada padat, rapat evaluasi dapat tertunda hingga beberapa minggu, mengakibatkan keterlambatan penerapan rekomendasi perbaikan.

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan internal juga masih rendah. Proses rekapitulasi dan distribusi laporan sebagian besar masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat alur kerja dan menyulitkan pencarian data saat diperlukan. Pegawai mengakui bahwa penggunaan sistem digital yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, namun saat ini sebagian besar pelaporan masih mengandalkan aplikasi perpesanan biasa. Hal ini berpotensi mengurangi akurasi dokumentasi dan konsistensi data.

Tabel 1. Temuan Utama Penelitian

No	Aspek yang Dinilai	Temuan Positif	Tantangan / Kendala
1	Struktur & Mekanisme Pengawasan	Sistem pengawasan berjenjang dengan SOP jelas; supervisi lapangan aktif pada tahap kampanye dan pemungutan suara	Monitoring belum konsisten di semua kecamatan; tahap rekapitulasi kurang optimal
2	Dampak terhadap Kinerja Pegawai	Peningkatan kedisiplinan, ketepatan laporan, dan kepatuhan prosedur	Tekanan psikologis dan beban mental akibat

3	Administrasi & Pelaporan	Adanya laporan periodik mingguan dan evaluasi bulanan yang terstruktur	intensitas pengawasan tinggi Prosedur birokratis; keterlambatan rapat evaluasi saat tahapan padat; beban administratif tinggi
4	Indikator Efektivitas	Ukuran jelas: ketepatan waktu laporan, kualitas pengawasan, jumlah pelanggaran yang ditindak	Indikator belum sepenuhnya mencerminkan realitas lapangan
5	Pemanfaatan Teknologi	Kesadaran akan potensi teknologi untuk percepatan pelaporan	Proses masih manual; penggunaan aplikasi resmi terbatas; dokumentasi rawan tercecer
6	Pelatihan & Sosialisasi	Pelatihan rutin memberi arahan jelas bagi pengawas baru	Distribusi materi pelatihan belum merata; frekuensi terbatas; minim pendampingan lanjutan

2. Pembahasan

Upaya peningkatan kapasitas pengawas dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi yang mencakup prosedur pengawasan, pelaporan, dan etika kerja. Meskipun pelatihan mendapat respon positif dan dinilai bermanfaat, distribusinya belum merata di semua kecamatan. Ada wilayah yang menerima pembekalan lengkap, sementara lainnya hanya mendapat informasi tertulis. Frekuensi pelatihan juga masih terbatas, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan penerapan di lapangan berjalan optimal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan internal di Bawaslu Kabupaten Nias selama Pilkada Serentak 2024 telah berhasil meningkatkan kedisiplinan, ketertiban administrasi, dan ketepatan laporan pengawasan, terutama pada tahap kampanye. Namun, efektivitasnya belum merata di seluruh kecamatan, dan masih terdapat hambatan berupa birokrasi pelaporan yang rumit, keterlambatan evaluasi, rendahnya pemanfaatan teknologi, serta distribusi pelatihan yang belum optimal. Ke depan, penyederhanaan prosedur, percepatan alur komunikasi, dan peningkatan teknologi pendukung menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas sistem ini dalam mewujudkan pengawasan Pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Tabel 2. Rekomendasi Strategis Perbaikan Sistem Pengawasan Internal

No	Bidang Perbaikan	Rekomendasi
1	Konsistensi Monitoring	Standarisasi pengawasan di semua kecamatan; penempatan tim supervisi khusus di wilayah akses sulit
2	Penyederhanaan Administrasi	Pemangkasan prosedur pelaporan; penggunaan format laporan singkat untuk kondisi darurat
3	Evaluasi & Feedback	Penegakan disiplin jadwal evaluasi; penerapan evaluasi cepat pasca-tahapan penting
4	Pemanfaatan Teknologi	Penerapan sistem digital terintegrasi untuk input laporan real-time; pelatihan penggunaan aplikasi resmi
5	Keseimbangan Pengawasan & Kesejahteraan Pegawai	Pengaturan beban kerja; penyediaan dukungan psikologis pada masa tahapan padat
6	Penguatan Kapasitas SDM	Pelatihan berkala dan merata; pendampingan lapangan; modul pembelajaran daring untuk pengawas di daerah terpencil

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias pada Pilkada Serentak

2024 secara umum telah menunjukkan kinerja yang efektif. Pengawasan berjalan dengan baik terutama pada tahap-tahap krusial seperti masa kampanye, di mana pengawas lebih aktif melakukan pemantauan dan penindakan terhadap potensi pelanggaran. Namun, efektivitas ini belum merata di seluruh kecamatan, karena penerapannya masih dipengaruhi oleh perbedaan kesiapan sumber daya manusia dan tingkat koordinasi antar pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka pengawasan telah dibangun dengan cukup baik, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar kualitasnya konsisten di semua wilayah.

Salah satu faktor yang mendukung efektivitas pengawasan adalah adanya prosedur kerja yang sudah terstruktur dan panduan yang jelas bagi para pengawas. Dengan adanya pedoman tersebut, pengawasan dapat dilakukan sesuai alur yang telah ditentukan dan meminimalkan risiko kesalahan prosedural. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan prosedur ini sangat bergantung pada kedisiplinan serta keterampilan para pengawas di lapangan. Di beberapa kecamatan, keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas menjadi kendala tersendiri, sehingga pelaksanaan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh atau seragam.

Meskipun ada pencapaian positif, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satunya adalah lambatnya prosedur birokrasi yang sering memperlambat proses penanganan laporan atau temuan pelanggaran. Proses administrasi yang berbelit-belit menyebabkan waktu respons terhadap kasus menjadi lebih lama, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penindakan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan teknologi pendukung yang seharusnya dapat membantu mempercepat alur pelaporan dan pengolahan data di tingkat kabupaten maupun kecamatan.

Selain kendala administratif, terdapat pula permasalahan dalam hal pemerataan pelatihan bagi para pengawas. Tidak semua pengawas di tingkat kecamatan mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan yang memadai, baik dari segi materi maupun frekuensi pelaksanaannya. Hal ini berakibat pada adanya perbedaan pemahaman dan keterampilan antar pengawas dalam melaksanakan tugas, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pengawasan di lapangan. Ketidakmerataan ini menjadi tantangan serius karena tugas pengawasan menuntut kemampuan teknis dan pemahaman regulasi yang setara di semua tingkatan.

Kendala lainnya adalah adanya perbedaan persepsi pegawai terhadap beban kerja yang diemban. Beberapa pengawas merasa beban kerja terlalu berat dan tidak sebanding dengan dukungan sumber daya yang tersedia, sementara sebagian lainnya menganggap beban tersebut masih dapat dikelola. Perbedaan persepsi ini berdampak pada motivasi kerja dan kualitas kinerja individu, yang pada akhirnya memengaruhi hasil pengawasan secara keseluruhan. Keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada sistem yang dirancang, tetapi juga pada komitmen dan kesiapan mental para pengawas untuk menjalankan tugasnya dengan optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sistem pengawasan internal Bawaslu Kabupaten Nias pada Pilkada Serentak 2024 memiliki landasan yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan dari segi pemerataan pelaksanaan, kesiapan sumber daya manusia, kelancaran birokrasi, serta ketersediaan dukungan teknologi. Upaya perbaikan yang terarah, terutama dalam peningkatan kompetensi pengawas dan percepatan alur kerja, menjadi kunci untuk memastikan pengawasan yang lebih merata dan optimal di seluruh kecamatan. Dengan perbaikan yang tepat, diharapkan sistem pengawasan ini dapat semakin memperkuat integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

E. Referensi

- Affandi, H. A., Achmad Rozi, S. E., MM, C., & Sunarsi, D. (2021). *Manajemen SDM strategik*. Bintang Visitama.
- Agusnawati, R., Nurfadillah, N., Wiradana, N., & Mukhtar, A. (2024). Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(1), 87-105.
- Agustina, A., & Salmah, N. N. A. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Produktivitas Karyawan Pada Hotel Santika Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 308-319.
- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Ananto, M. R., Nururrohmah, T., & Natalia, D. U. (2023). Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 1(2), 125-137.
- Anggrahini, T., Widyastuti, S., & Sihite, M. (2023). Pengaruh Internal Kontrol, Organization Behaviour Dan Digitalisasi Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 2(11), 1079-1093.
- Ardan, M., & Jaelani, A. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia: Turnover Intention Dapat Mempengaruhi Kualitas Kinerja Perusahaan. Cv. Pena Persada.
- Arina, Y., Febrianti, H., Sabandi, A., & Alkadri, H. (2023). Peran Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 747-753.
- Baidowi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jambura Journal of Educational Management*, 85-102.
- Budi, A. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi oleh Produktivitas Kerja Karyawan. *Dynamic Management Journal*, 6(2), 83-90.
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik: Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 195-203.
- Creswell, W. (2024). 4.2. Karakteristik Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 45.
- El Khair, F., Defit, S., & Yuhandri, Y. (2021). Sistem Keputusan dengan Metode Multi Attribute Utility Theory dalam Penilaian Kinerja Pegawai. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 215-220.
- Fachrezi, H. A., & Nasution, A. I. L. (2023). Fungsi manajemen pengawasan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan hibah Biro Kesra Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1), 729-734.
- Harmoko, M. P., Kilwalaga, I., Pd, S. P. I., Asnah, S. P., Rahmi, S., Adoe, V. S., ... & Arina, F. (2022). Buku ajar metodologi penelitian. Feniks Muda Sejahtera.
- Insan, M. Y., Batubara, S. S., & Sari, R. M. (2024). Sinergi Kemampuan Kerja Dan Pengawasan Dalam Optimalisasi Produktivitas Pegawai Dinas. *Serasi Media Teknologi*.
- Iswahyudi, M. S., Elshifa, A., Abas, M., Martalia, D., Mutia, A., Imlabla, F. V., ... & Manafe, D. (2023). *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia: Panduan Mengelola Organisasi Publik dan Bisnis Menuju Kesuksesan di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jamal, R., Ikhval, A. A., Nisa, N. A., Qulbi, S. H., & Arifin, M. U. (2024). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mengoptimalkan Supply Chain Management. *Jurnal Inovasi Global*, 2(7), 737-750.
- Karya, D., Kusumastuti, S. Y., Kabul, E. R., Joni Mantong, S. H., Sjukun, S. T., & SM, M. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takaza Innovatix Labs.
- Khairani, L., Sugara, R., & Khair, H. (2022). Peran Motivasi Dalam Memediasi Pengaruh Pengawasan Dan Budaya Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Honorar Pada Upt Asrama Haji Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 5(1), 42-51.
- Marwah, R., Anwar, A., & Syachbrani, W. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Kinerja Pada Bawaslu Kota Makassar. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 482-491.
- Marwah, R., Anwar, A., & Syachbrani, W. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam Mendukung Kinerja Pada Bawaslu Kota Makassar. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 482-491. *itics (JGLP)*, 5(2), 172-186.
- Mauliza, P. (2020). Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 6(2), 71-81.
- Muslim, S. (2022). Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 83-104.
- Nurhandayani, A. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, dan Beban Kerja terhadap Kinerja. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital (Ekobil)*, 1(2), 108-110.
- Oktavian, A., Priyono, N., & Suryatimur, K. P. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal (Studi Kasus Pada Kantor Pusat BPKP). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3366-3375.
- Pandibu, L. (2022). Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Pramono, A., & Nopritama, M. (2020). Pengembangan Karir Dan Motivasi Kerja Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan). *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 42-57.
- Pramudya, A. A., Purnama, M. R., Andarbeni, N. S., Nurjayanti, P., & Anshori, M. I. (2023). Implementasi budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja karyawan. *Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(4), 24-40.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Romadhon, I. Z. (2023). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019 Di Jakarta Barat (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rosmansyah, M. (2021). Peran Pimpinan dalam Pengawasan Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Karimun. *JURNAL KEMUNTING*, 2(01), 264-281.
- Ruhayat, I., Meria, L., & Julianingsih, D. (2022). Peran pelatihan dan keterikatan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan pada industri telekomunikasi. *Technomedia Journal*, 7(1 Juni), 90-110.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Silalahi, U., & Mifka, S. A. (2015). *Asas-Asas Manajemen*.
- Silintowe, Y. B. R., & Dewi, Y. E. P. (2020). *Manajemen Perkantoran Modern*.
- Sonjaya, Y., Ambarsari, M., Marnoto, M., & Julaeha, E. (2024). Studi Tentang Pengawasan dan Lingkungan Kerja serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 1-11.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 137-158.
- Supriatna, D. (2020). Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 310-330.
- Terry, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Tuko, K. (2021). Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 2112-2131.
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., ... & Rahman, A. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., ... & Rahman, A. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Waluyo, P. F., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Pol*
- Weyant, E. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches: by John W. Creswell and J. David Creswell*, Los Angeles, CA: SAGE, 2018, \$38.34, 304pp., ISBN: 978-1506386706.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73-85.
- Yuliani, W., & Supriatna, E. (2023). *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Penerbit Widina.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.